

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA BAPPEDA LITBANG KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjanah S-1
Ilmu Administrasi Pulik



Oleh :

**DELA SEPYAH
NIM. 07011382126237**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU PILITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA BAPPEDA LITBANG KOTA
PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh:

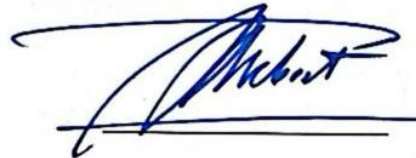
DELA SEPYAH

NIM. 07011382126237

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2025

Pembimbing

Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



Mengetahui, Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA BAPPEDA LITBANG KOTA
PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh:
DELA SEPYAH
NIM. 07011382126237

Telah dipertahankan di Depan Komisi Penguji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada tanggal Februari 2025

Pembimbing :

1. Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

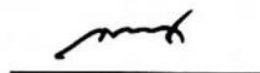
Tanda Tangan



Penguji :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



2. Januar Eko Arvansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,



PERNYATAAN ORINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dela Sepyah
NIM : 07011382126237
Fakultas/Jurusan : FISIP/Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Bappeda Litbang Kota Palembang”** ini adalah sebenar-benarnya karya saya sendiri dan dalam penyusunannya saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang ditetapkan kepada saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas yang dibuat secara sadar dan tanpa ada sedikitpun paksaan dari pihak lain.

Palembang, Februari 2025



Dela Sepyah
NIM.07011382126237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Knowledge is the light that illuminates the path of truth"

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang.

“I Love You Mother Father”

ABSTRAK

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan penerapan SPIP di Bappeda Litbang Kota Palembang serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghadang dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Bappeda Litbang Kota Palembang telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Lingkungan pengendalian sudah mulai diterapkan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, namun masih terdapat kelemahan dalam penilaian risiko dan kegiatan pengendalian yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, tidak adanya SOP khusus SPIP serta kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem ini menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini mencakup penyusunan SOP SPIP, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimalisasi penilaian risiko, penguatan mekanisme pemantauan informasi dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sistem pengendalian internal. Dengan perbaikan ini, penerapan SPIP yang diharapkan di Bappeda Litbang Kota Palembang dapat berjalan lebih optimal guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: SPIP, Evaluasi, Pengendalian Internal, Tata Kelola Pemerintahan, Bappeda Litbang Kota Palembang.

Pembimbing

Dr.M Nur Budiyo, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



ABSTRACT

The Government Internal Control System (SPIP) is an important instrument in realizing transparent, accountable and efficient government governance. This research aims to implement the implementation of SPIP in the Palembang City Research and Development Bappeda and identify the obstacles that hinder its implementation. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that the implementation of SPIP in the Palembang City Research and Development Bappeda has gone quite well, but there are still several aspects that need to be improved. The control environment has begun to be implemented through supportive policies and regulations, but there are still weaknesses in risk assessment and control activities that are not yet fully effective. Apart from that, the absence of a specific SOP for SPIP and the lack of employee understanding of this system is a challenge in its implementation. The recommendations provided in this research include preparing SPIP SOPs, increasing human resource capacity through training, optimizing risk assessments, strengthening information monitoring and evaluation mechanisms, and utilizing technology in managing the internal control system. With these improvements, it is hoped that the implementation of SPIP in the Palembang City Research and Development Bappeda can run more optimally in order to improve the quality of regional government governance.

Keywords: *SPIP, Evaluation, Internal Control, Governance, Palembang City Research and Development Bappeda.*

Pembimbing

Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



Palembang, Februari 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan izin Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, hingga nikmat pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Bappeda Litbang Kota Palembang”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang diselesaikan bukan tepat waktu tetapi di waktu yang tepat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan waktu juga pikiran dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orangtuaku yang telah menjadi orang tua terbaik selalu meberikan cinta, perhatian penuh, nasehat, motivasi dengan penuh kesabaran dan pengorbanan baik secara moral dan materi trimakasih atas kasih sayang dan doa’a yang selalu dipanjatkan tidak pernah habis dalam membesarkan dan mendidik penulis sampai pada titik ini. Untuk itu skripsi yang telah dibuat penulis ini dipersembahkan kepada kedua orang tua yang telah mendukung untuk keberhasilan penulis hingga saat ini.

Tentu dalam menyelesaikan skripsi ini, saya mendapatkan banyak dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan kata terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc. LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M, Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing

Skripsi yang telah membimbing dan memberikan waktu juga pikiran dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
8. Bapak Drs, Syafaiudin Zakir, M. Sc selaku Dose Pembimbing Akademik yang tak henti – hentinya memberikan dorongan dan arahan terkait Akademik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Kaban, Kepala Bidang, dan Seluruh Staff Bappeda Litbang Palembang.
11. Kepada kedua orang tua, saudara, serta keluarga yang telah mendukung selama ini.
12. Semua teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantun untuk karya kedepan yang lebih baik.

Palembang, Februari 2025

Penulis

Dela Sepyah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	12
2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	13
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan (SPIP)	13
2.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	16

2.4.1	Lingkungan pengendalian.....	19
2.4.2	Penilaian risiko.....	19
2.4.3	Kegiatan pengendalian.....	20
2.4.4	Informasi dan komunikasi	21
2.4.5	Pemantauan	22
2.5	Maturisasi (SPIP)	23
2.6	Gambaran (SPIP) Dalam Sistem Pemerintahan.....	25
2.7	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda Palembang	30
2.8	Teori Yang Digunakan.....	34
2.9	Penelitian Terdahulu	38
2.10	Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Desain Penelitian.....	48
3.2	Objek dan Lokasi Penelitian	48
3.3	Definisi Konsep	49
3.4	Fokus Penelitian.....	51
3.5	Informan Penelitian.....	52
3.5.1	Kriteria Informan	53
3.5.2	Key Informan	53
3.5.3	Informan Pendukung.....	54
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7	Analisis Data	56
3.8	Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		60
4.1	Gambaran Umum Instansi.....	60
4.1.1	Gambaran Umum Kota Palembang	60
4.1.2	Gambaran Umum Bappeda Litbang.....	62
4.1.3	Gambaran Umum inspektorat Kota Palembang.....	66
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	71

4.3 Hasil Penelitian	73
4.4 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penerapan SPIP Pada Bappeda Litbang Kota Palembang.....	94
4.5 Pembahasan.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	39
Table 2 Fokus Penelitian	51
Table 3 Informen Penelitian	54
Table 4 Kategori risiko	84
Table 5 Level Kriteria Kemungkinan	86
Table 6 Risiko Strategis.....	87
Table 7 Risiko Oprasional.....	88
Table 8 Rencana Tindak Pengendalin Strategis	90
Table 9 Rencana Tindak Pengendalin Oprasional	90
Table 10 Matriks Hasil Penelitian	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Maturitas SPIP	7
Gambar 2 Dokumentasi Rapat Penilaian Mandiri SPIP	16
Gambar 3 <i>COSO Integrated Framework dan Perspektif SPIP</i>	26
Gambar 4 Kerangka Pemikiran	47
Gambar 5 <i>Components of Data Analysis: Interactive Model</i>	58
Gambar 6 Peta Batas Administrasi Kota Palembang	60
Gambar 7 Struktur Organisasi Bappeda Litbang	66
Gambar 8 Struktur Organisasi Inspektorat	71
Gambar 9 Proses Manajemen Risiko	82
Gambar 10 Dokumentasi Rapat	91

DAFTAR SINGKATAN

ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BAPPEDA LITBANG	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
COSO	:	Komite Organisasi Sponsor Komisi Treadway
KKN	:	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
UU	:	Undang-Undang
PP	:	Peraturan Pemerintah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIKD	:	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
SOP	:	Standar Prosedur Operasional
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	112
Lampiran 2 Kartu Bibbingan Proposal Skripsi	115
Lampiran 3 Lembar Perbaikan Ujian Seminar Proposal Skripsi	116
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	117
Lampiran 5 Lembar Perbaikan Ujian Skripsi	118
Lampiran 6 Surat Penelitian Ke Bappeda Litbang	119
Lampiran 7 Surat Penelitian Ke Inspektorat	120
Lampiran 8 SK Pembimbing Skripsi	121
Lampiran 9 Lulus Suliet.....	123
Lampiran 10 Dokumentasi	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan masyarakat saat ini dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah pusat yang diwakili oleh pemerintah daerah dari masing-masing daerah harus mencanangkan peningkatan Pelayanan Birokrasi kepada masyarakat dengan arahan kebijakan dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Pemerintahan yang bersih, dengan struktur birokrasi yang bebas dari KKN, merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang bersih yang dijalankan di suatu negara dengan masyarakat yang kuat dikenal dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih mengharuskan pemerintah bersikap proaktif, bermoral, dan juga dilengkapi dengan checks and balances (De costa, 2023)

Pemerintah telah mengeluarkan 3 perundang-undangan dibidang keuangan Negara dalam rangka upaya mereformasi dibidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara

yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara. (RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 2024).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 58 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara. Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menjalankan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. . (RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya peraturan pemerintah tersebut selain sebagai amanah dari reformasi di bidang keuangan Negara juga ditujukan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (*clean goverment*), merupakan akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governace*).

Pencapaian atas pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang mengatur mengenai pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut telah jelas disebut dalam pasal 2 ayat (1) Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah.

Seperti yang telah diuraikan, SPIP merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mencapai Sistem Birokrasi yang memadai dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini terdiri dari 5 unsur yaitu: Lingkungan Pengendalian, Pengendalian Resiko, Kegiatan Pengendalian,

Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern. (RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 2024).

Pertama, Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun, sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan. Karena organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang yang baik akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya. Kedua, penilaian resiko dalam pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Ketiga, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggung jawab pengendalian secara baik. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan, atau antara karyawan. Kelima, pemantauan (*monitoring*) harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya, para pemimpin/pejabat instansi Pemerintah (SKPD) wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bappeda Litbang kota Palembang merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah kota Palembang yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Palembang. Bappeda Litbang kota Palembang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 10 tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebanyak 5 (lima) kali terakhir dengan peraturan daerah kota Palembang nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Palembang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Palembang dan peraturan walikota Palembang nomor 72 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota Palembang sebagaimana diubah dengan peraturan walikota Palembang nomor 2 tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang.

Adapun peraturan Walikota Palembang nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Serta

peraturan Walikota Palembang nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026.

Pemerintah memiliki beberapa fungsi, salah satunya pelayanan yang berhubungan langsung dengan unit organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Pelayanan ini diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai upaya membantu dan mengarahkan organisasi mencapai tujuan pelayanan diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga organisasi bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan (Indri, 2023).

Sistem pengendalian intern menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP) yang mengadopsi dari COSO (*Internal Control Framework*) dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Kuntadi, 2022).

Sebuah Kementerian/Lembaga dinilai telah menerapkan SPIP dengan baik jika nilai minimal maturitas SPIP yaitu pada level 3 (terdefinisi) (Kuntadi, 2022). Nilai maksimal dari maturitas SPIP yaitu level 5 (optimum) dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Telah melakukan penyusunan rencana kinerja
2. Telah melakukan pendefinisian kinerja

3. Telah menyusun strategi pencapaian sasaran yang relevan dan terintegrasi
4. Telah terdapat desain dan kebijakan terkait pengendalian
5. Telah melaksanakan struktur dan proses pengendalian
6. Telah efektifnya pelaksanaan struktur dan proses pengendalian
7. Adaptif terhadap perubahan

Karakteristik maturitas SPIP dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Maturitas SPIP

KARAKTERISTIK LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Sumber : BPKP dikutip dari Hanasri, R., & Busono, P. (2021)

Perencanaan strategis sebagai kerangka awal dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan, merupakan tahapan sangat penting dilaksanakan oleh satuan organisasi pemerintah. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Dengan

demikian, perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, sehingga rencana strategis yang dibuat oleh pimpinan puncak bersama staf dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut (Lalongsa, 2023).

Kerangka kerja pertama untuk keseluruhan proses adalah perencanaan strategis. Salah satu tahapan krusial yang dilakukan unit organisasi pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, bahwa perencanaan strategis adalah proses yang berorientasi pada hasil yang harus diselesaikan dalam waktu satu sampai lima tahun dengan tetap mempertimbangkan peluang dan tantangan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategis sebenarnya diperlukan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Manajemen puncak dan karyawan membuat rencana strategis, yang kemudian dilaksanakan di seluruh tingkat organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Lalongsa, 2023).

Akuntabilitas pengawasan diharapkan dapat tercapai dengan adanya rencana strategis. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, perencanaan strategis merupakan alat dan pendekatan yang direkomendasikan. pemerintah, dan sejumlah metode akuntabilitas kinerja penting digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitasnya. Dalam proses evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, ini masih menemui kendala, sebagai berikut :

1. Proses Evaluasi Kinerja yang Belum Dilaksanakan Secara Optimal
2. Audit yang Belum Berbasis Kinerja
3. Belum adanya SOP SPIP pada Bappeda Litbang
4. Kurangnya SDM yang memahami terkait SPIP di Bappeda Litbang

Salah satu elemen utama yang dapat memfasilitasi implementasi yang efektif pada pengendalian intern mengacu pada seberapa baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan tugasnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), ini beroperasi membantu Walikota mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini sesuai dengan peran Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan kinerja dan keuangan internal (Lalongsa, 2023).

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Instansi Pemerintah X sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kelemahan yang signifikan. Dari 11 temuan yang diperoleh BPK pada tahun 2020, 9 di antaranya terkait dengan pengendalian intern, khususnya dalam penyaluran bantuan program prioritas nasional. Kesimpulan berulang ini dapat menghambat pencapaian tujuan program. Selain itu, penguatan pemantauan pengendalian internal diperlukan karena hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti, menghambat perbaikan yang optimal. Amelia, D., & Halim, A. (2021). Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan SPIP pada Sub Bagian Keuangan di Dinas Perindustrian Sleman telah efektif dengan skor level 4 (“Terkelola & Terukur”), sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Sistem telah terdokumentasi dan terotomatisasi melalui SIKD, namun terdapat kelemahan di dalamnya pelatihan SDM, penyerapan sistem akses, dan pemantauan evaluasi yang belum otomatis.

Penerapan SPIP ini diharapkan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, bahwa SPIP mempunyai 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien; (2) Laporan keuangan

yang dapat diandalkan; (3) Pengamanan aset negara; dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Merujuk hal tersebut maka peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Bappeda Litbang Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Bappeda Litbang Kota Palembang?
- 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam penerapan (SPIP) pada Bappeda Litbang Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Bappeda Litbang Kota Palembang.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan SPIP pada Bappeda Litbang Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Bappeda Litbang Kota Palembang” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan memahami implementasi SPIP dalam pengawasan program pembangunan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya terkait pengendalian internal dalam organisasi pemerintah.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bappeda Litbang Kota Palembang dan instansi pemerintah lainnya dalam mengoptimalkan evaluasi SPIP. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang elemen-elemen SPIP, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, diharapkan dapat meningkatkan evaluasi kinerja SPIP pada Bappeda Litbang kota Palembang.
3. Manfaat Akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan peneliti lainnya yang tertarik mempelajari sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama atau yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluvianti, R. (2022). Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang 2024-2026. Palembang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Palembang. *Buku Remerintah Kota Palembang*, 2(1), 32–49.
- Amelia, D., & Halim, A. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) pada penyusunan laporan keuangan di dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman. *Behavioral Accounting Journal*, 4(1), 323–336. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i1.133>
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1825>
- Fitriani, L., & Destia, S. (2024). Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal:(studi kasus pada perguruan tinggi negeri X). *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*. 4(1), 1–12.
- Hanasri, R., & Busono, P. (2021). (2021). *Pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi*.
- Hanna, L. S. (2019). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman. *Artikel Ilmiah*. 5(60). <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/176788>
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). No TiEvaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerjatlle. X. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3006–3017.

- Iradah, N. V., & Yahya, M. R. (2021). Implementasi komponen kegiatan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Spip) dalam mewujudkan prinsip transparansi pada disbudpar Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(4), 579–587.
- Irawati, I., Milwan, M., & Riswanda, R. (2023). Efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 6(2), 117–137. <https://doi.org/10.33753/madani.v6i2.279>
- Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2023). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Economina*, 2(7), 1719–1729. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.668>
- Lalonsang, R., & Mamentu, M. (2021). Implementasi kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah pada komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 52–61.
- Marsela Marsela, & Acep Suherman. (2024). Analisis sitem pengendalian internal pada kas badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi. *Jurnal Akuntansi* 45, 5(1), 171–188. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2463>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Research Methods. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3rd Ed.)*. Thousand Oaks, 31–33. <https://doi.org/10.4324/9781003444718-9>

- Nada, S. L. Q. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 7 Kota Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri). *Artikel Bagian Bab II.*, 03–09.
- Nurhayati, & Patadungan, H. (2022). Pengaruh implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatanteknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kab. Luwu. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 440–450. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2674>
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86.
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif COSO Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(8), 1–11. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/95/64>
- Ramdhani, P. I. (2019). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) untuk kegiatan pelayanan di instansi pemerintah (studi kasus di kantor pertanahan Kabupaten Sleman) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). *Artikel*.
- Rasheed Al-Adeem, K. (2022). Revisiting the Role of Accounting from Ancient to Contemporary Times: An Attempt to Evaluate the Role of Corporate Accounting. *Jurnal Strategies in Accounting and Management*, 3(4), 1–13. <https://doi.org/10.31031/siam.2022.03.000569>
- RTP Bappeda Litbang kota Palembang (2024). Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip). 01-05
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk “Loyalitas Kerja” Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. The Influence Of Compensation

On Employee Loyalty At PT. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.

Suratman, S., Sayidah, N., & Ady, S. U. (2023). Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dalam Meningkatkan Level Maturitas SPIP. *Jurnal Minfo Polgan*, 12, 2917–2928. <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/view/13429%0Ahttps://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/download/13429/2332>

Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah (spip), dan penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>

Toha, I., Monoarfa, R., & Pilomonu, M. R. S. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Gorontalo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(7), 3088–3098.

Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati, D. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) terhadap penerapan good governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.

Widiyastomo, R. P. (2020). Percepatan implementasi reformasi birokrasi di pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2020-2024. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 17(2), 84-103.